

# PENGUATAN DEMOKRASI DAN PEMILU BAGI PEMILIH PEMULA MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024: (STUDI PENGABDIAN PADA MAHASISWA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA GORONTALO)

Sofyan Alhadar<sup>1</sup>, Yayan Sahi<sup>2</sup>, Putri Patrisia Katili<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial, Universitas Bina Taruna Gorontalo

<sup>2</sup>Prodi PPKn, Pasca Sarjana, Universitas Negeri Gorontalo

<sup>3</sup>Prdoi Ilmu Pemerintahan, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

e-mail: alhadsof21@gmail.com<sup>1</sup>, yayansahi1999@gmail.com<sup>2</sup>, putrikatili6@gmail.com<sup>3</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan pemahaman pemilu bagi pemilih pemula menjelang Pemilu 2024, khususnya pada mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan secara offline dengan pendekatan ceramah dan simulasi kepemiluan. Hasil pelaksanaan pengabdian menunjukkan dua aspek penting. Pertama, dari segi pemahaman mahasiswa terkait pemilihan umum, sebanyak 60% peserta mampu memilih sumber informasi yang kredibel, sementara 40% masih memerlukan peningkatan literasi politik. Kedua, terkait pemahaman bentuk pengawasan partisipatif menjelang Pemilu 2024, sebanyak 20% peserta masih belum mampu mengidentifikasi secara menyeluruh, sedangkan 80% yang terlibat dalam kegiatan ini telah meningkatkan pemahamannya. Secara umum, hasil ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengabdian mahasiswa memberikan dampak positif terhadap pemahaman mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Meskipun sebagian peserta memerlukan perhatian lebih dalam meningkatkan literasi politik dan pemahaman pengawasan partisipatif, partisipasi mahasiswa secara signifikan memperbaiki pemahaman sebagian besar peserta. Oleh karena itu, untuk meningkatkan dampak positif dan meratakan pemahaman, disarankan kepada instansi berikutnya, melanjutkan kegiatan pengabdian serupa dengan penekanan pada aspek-aspek yang memerlukan perhatian lebih, seperti pengembangan program literasi politik dan pelatihan mengenai pengawasan partisipatif. Upaya ini diharapkan memastikan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam mendukung proses demokrasi dan pemilihan umum di masa depan.

**Kata kunci:** Penguatan Demokrasi; Pemilu 2024; Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

## Abstract

This research aims to strengthen democracy and electoral understanding for novice voters leading up to the 2024 elections, particularly among students at Nahdlatul Ulama University Gorontalo. The implementation method of this community service was carried out offline through lecture-based approaches and electoral simulation. The results of the community service implementation reveal two crucial aspects. Firstly, in terms of students' understanding of general elections, 60% of participants were able to choose credible sources of information, while 40% still require improvement in political literacy. Secondly, regarding the understanding of participatory oversight forms leading up to the 2024 elections, 20% of participants still couldn't identify comprehensively, while 80% involved in this activity have enhanced their understanding. In general, these results indicate that the student community service has a positive impact on the understanding of Nahdlatul Ulama University Gorontalo students. Although some participants need more attention to enhance political literacy and understanding of participatory oversight, the significant participation of students has notably improved the understanding of the majority. Therefore, for the next instances, it is recommended to continue similar community service activities with an emphasis on aspects that require more attention, such as the development of political literacy programs and training on participatory oversight. These efforts are expected to ensure that students at Nahdlatul Ulama University Gorontalo become more effective agents of change in supporting the democratic process and elections in the future.

**Keywords:** Strengthening Democracy; 2024 Elections; Nahdlatul Ulama University Gorontalo Students

## PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi dan sistem pemilu sepanjang sejarah telah melibatkan transformasi signifikan dari zaman Yunani kuno hingga era modern. Georg Sorensen memberikan definisi bahwa istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang merujuk kepada rakyat, dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Artinya, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang diorganisir oleh rakyat, berasal dari rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat. (Shobahah, 2019). Sekilas, di Athena sekitar 600 SM, demokrasi dimulai sebagai sistem langsung di mana warga kota berkumpul untuk membuat keputusan politik secara kolektif. Namun, partisipasi dalam demokrasi terbatas pada kelompok tertentu, seperti laki-laki dewasa, dan mengalami pasang surut selama Perang Peloponnesos. Kemudian, di Romawi, meskipun bukan demokrasi langsung, Republik Romawi melibatkan partisipasi aktif warga kota dalam pengambilan keputusan. Seiring perjalanan waktu, era pertengahan ditandai oleh sistem feodal yang otoriter. Pemikiran demokrasi mulai muncul kembali selama periode Renaissance, dan ide-ide Pencerahan pada abad ke-18 seperti Montesquieu dan Rousseau mempengaruhi Revolusi Amerika dan Prancis, yang menghasilkan dokumen konstitusional yang mendasari prinsip demokrasi. Di abad ke-19, perkembangan demokrasi melibatkan ekspansi hak pilih kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya dikecualikan. Abad ke-20 menyaksikan dominasi model demokrasi representatif, di mana warga memilih perwakilan untuk membuat keputusan politik. Pasca Perang Dunia II, proses dekolonisasi, pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyebaran nilai demokrasi turut mempengaruhi perkembangan demokrasi global.

Menyikapi hal itu, (Rosana, 2016) Demokrasi selalu terkait dengan isu hak asasi manusia, dan upaya untuk memperjuangkan demokrasi adalah langkah yang diambil oleh umat manusia untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasarnya. Hal ini karena demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang memberikan penghargaan terhadap hak dasar manusia. Demokrasi tidak hanya mencakup hak sipil dan politik masyarakat, melainkan juga erat kaitannya dengan sejauh mana hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat terjamin dalam perkembangannya. Untuk mempertahankan tatanan demokrasi yang utuh, John Locke juga menyatakan bahwa untuk mengontrol kekuasaan penguasa negara dan melindungi hak-hak asasi warganya, tugas kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga bagian, yakni legislatif (bertanggung jawab membuat undang-undang), eksekutif (bertugas mempertahankan peraturan-peraturan dan mengadili), dan federatif (bidang kekuasaan yang tidak termasuk dalam dua kekuasaan sebelumnya). (Purnamawati, 2020). Dapat dimaknai, Demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang memberikan penghargaan terhadap hak dasar manusia, yang melibatkan upaya umat manusia untuk melindungi hak-hak dasarnya, baik yang bersifat sipil dan politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya.

Di Indonesia, perkembangan demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia telah mencatat perjalanan yang panjang dan penuh tantangan sejak zaman kolonial hingga masa kini. Pada awal abad ke-20, Belanda menerapkan penindasan politik terhadap penduduk pribumi, tetapi pendudukan Jepang membawa perubahan dinamika dan mendorong gerakan nasionalis. Pasca-Proklamasi Kemerdekaan pada 1945, pemilihan Konstituante pada 1955 menjadi langkah awal dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Era Orde Lama dan Orde Baru ditandai oleh pemilu dengan kecenderungan manipulatif, terutama dalam mendukung penguasa saat itu. (Sahi et al., 2023). Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan, membuka ruang bagi demokrasi yang lebih terbuka dan pemilihan langsung presiden pada 2004. Perubahan undang-undang pemilu pada 2008 mengukuhkan sistem perwakilan proporsional. Meskipun demokrasi Indonesia terus berkembang, tantangan seperti keterlibatan militer dan isu keadilan tetap menjadi fokus, sementara pemilu 2014 dan 2019 mencerminkan pergeseran dinamika politik yang terus berlanjut. Dalam menghadapi masa depan, Indonesia dihadapkan pada tantangan membangun sistem demokrasi yang lebih kuat, inklusif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Pun di lain sisi, tantangan dan perkembangan terkini dalam demokrasi Indonesia melibatkan pemahaman dan penanganan isu-isu kritis. Meskipun peran militer dalam politik telah berkurang, masih ada keprihatinan terkait keterlibatan militer dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Isu keadilan, transparansi, dan pemenuhan hak asasi manusia juga tetap relevan. Upaya untuk membangun sistem demokrasi yang lebih kuat juga mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pendidikan politik, dan penanganan tuntas terhadap korupsi. Sembari mengatasi tantangan tersebut, Indonesia telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia dengan pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala dan partisipatif. Kesimpulannya, sejarah demokrasi Indonesia adalah cerita tentang perjalanan yang dinamis dan terus berkembang, diwarnai

oleh perubahan politik, konflik, serta upaya membangun fondasi demokrasi yang lebih matang dan inklusif. Dalam menghadapi masa depan, peran penting masyarakat sipil, partisipasi aktif warga, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi akan terus menjadi kunci kesuksesan dalam membangun Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.

Menjelang pemilu 2024, Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan dalam mengokohkan sistem demokrasinya. Pemilu ini diantisipasi sebagai panggung penting untuk mengukur sejauh mana perjalanan demokrasi telah mencapai kedewasaan. Penyelenggaraan pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari kecurangan akan menjadi kunci untuk memperkuat legitimasi pemerintahan. Peningkatan partisipasi pemilih, khususnya dari kalangan pemilih muda dan perempuan, juga menjadi fokus penting. Pihak berwenang perlu memastikan bahwa seluruh proses pemilihan, mulai dari registrasi pemilih hingga penghitungan suara, dilakukan dengan integritas dan akuntabilitas. Seiring dengan itu, pertanyaan seputar isu-isu krusial seperti ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial akan menjadi pusat perdebatan dalam kampanye. Pemilu 2024 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi demokrasinya, mendorong partisipasi publik yang lebih aktif, dan merespons dinamika tuntutan masyarakat secara efektif. Dalam menghadapi masa depan, konsolidasi demokrasi di Indonesia tidak hanya terletak pada suksesnya pemilu, tetapi juga pada komitmen berkelanjutan untuk mengatasi tantangan dan memperkuat nilai-nilai demokratis dalam segala aspek kehidupan bangsa.

Kesadaran dan keterlibatan pemilih pemula merupakan aspek krusial dalam menjaga kesehatan demokrasi menjelang Pemilu 2024 di Indonesia. Pemilih pemula, menurut UU No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20, merujuk kepada warga Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu. Pasal 19 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pada hari pemilihan atau pemungutan suara, pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun atau lebih, termasuk mereka yang sudah atau pernah menikah, dan memiliki hak pilih. (Kamuli et al., 2024). Juga harus diakui, meskipun terdapat peningkatan partisipasi pemilih muda dalam pemilu-pemilu sebelumnya, masih ditemui beberapa kesamaan yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi mereka. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak suara dan dampak politik terhadap kehidupan sehari-hari. Edukasi politik yang kurang memadai, baik di lembaga pendidikan maupun secara umum, dapat menjadi hambatan dalam memotivasi pemilih pemula untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi. Selain itu, isu-isu seperti kecenderungan apatis dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik, perasaan bahwa suara mereka tidak akan membuat perbedaan, atau kurangnya informasi mengenai calon dan program-program politik juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih pemula.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya penguatan literasi politik, baik melalui pendidikan formal maupun kampanye sosial yang merangsang kesadaran akan peran pemilih dalam menentukan arah pemerintahan. Peran teknologi dan media sosial menjadi faktor penting untuk mencapai pemilih pemula. Pemanfaatan platform digital dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang akurat, memberikan edukasi politik, dan memfasilitasi diskusi terbuka tentang isu-isu krusial. Keaktifan di ranah digital juga dapat merangsang partisipasi dan keterlibatan pemilih muda yang cenderung lebih akrab dengan media online. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, dan media massa menjadi kunci dalam mengatasi kesiapan pemilih pemula. Dengan membangun kesadaran, memberikan edukasi yang inklusif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik, Indonesia dapat memastikan bahwa Pemilu 2024 mencerminkan keterlibatan yang aktif dan demokratis dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi pemuda yang memegang peran kunci dalam membentuk masa depan negara.

Untuk menguatkan pemilih pemula menjadi orang yang cerdas dalam menentukan hak pilihnya setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan yang sesuai dengan realitas zaman saat ini. Pertama, penguatan literasi politik menjelang Pemilu 2024 menjadi sangat penting, terutama dalam mengatasi tantangan khusus yang dihadapi oleh pemilih pemula. Kesadaran politik di kalangan generasi muda perlu ditingkatkan melalui program edukasi yang lebih spesifik dan terfokus, dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital yang menjadi habitat alami mereka. Pemahaman mereka terhadap proses pemilu, peran lembaga-lembaga pemerintah, dan pentingnya partisipasi aktif perlu diperkuat. Kedua, Seiring penguatan rasionalitas politik juga harus diarahkan pada pemilih pemula. Mereka sering kali rentan terhadap penyebaran informasi palsu atau terpapar retorika yang tidak rasional.

Sehingga, kampanye pemahaman media pelatihan literasi digital, dan diskusi terbuka tentang isu-isu politik menjadi sangat relevan. Membangun kreativitas dan kemampuan berpikir analitis pada pemilih pemula dapat memberikan fondasi yang kuat untuk menghadapi dinamika politik yang

kompleks. Selanjutnya yang ketiga, pengawasan regulasi politik harus ditekankan dalam konteks melibatkan pemilih pemula. Mereka cenderung menjadi target empuk bagi upaya manipulasi atau intimidasi politik. Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban pemilih serta prosedur yang harus diikuti dalam melaporkan pelanggaran. Penguatan lembaga-lembaga pengawas dan peningkatan kehadiran mereka di dunia digital juga akan memberikan rasa kepercayaan kepada pemilih pemula. Pun dengan demikian, tujuan dilaksanakannya pengabdian ini adalah untuk memberikan Penguatan Demokrasi Dan Pemilu Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024 pada Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo.

## METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mengadopsi metode offline dengan kombinasi ceramah dan simulasi kepemiluan melalui media tayangan kepemiluan. Partisipan terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari 25 mahasiswa semester 1, dibimbing oleh dua orang dosen. Pilihan pendekatan offline diputuskan untuk menciptakan interaksi langsung dan suasana yang lebih interaktif antara pemateri dan peserta. Ceramah dianggap sebagai metode utama untuk menyampaikan informasi dan konsep kepemiluan. Terkait dengan hal ini, (Alhadar et al., 2022) menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian secara offline dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi masyarakat dan memperkuat daya yang dimiliki oleh mereka, serta membentuk kelompok masyarakat untuk meneruskan program pengabdian demi keberlanjutan. Selain itu, pendekatan simulasi kepemiluan melalui media tayangan akan digunakan untuk memberikan pengalaman langsung terkait proses dan mekanisme dalam dunia kepemiluan. Mahasiswa semester 1 dipilih sebagai peserta karena tahap awal perkuliahan dianggap waktu yang tepat untuk memperkenalkan dan membangun pemahaman dasar mengenai kepemiluan. Dengan jumlah peserta yang terbatas, yakni 25 orang, diharapkan dapat meningkatkan interaksi dan partisipasi aktif. Melibatkan dua orang dosen sebagai fasilitator diharapkan dapat memastikan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penguatan Literasi Politik Menjelang Pemilu 2024

Penguatan literasi politik merujuk pada upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam mengenali, menganalisis, dan berpartisipasi dalam proses politik. Ini melibatkan peningkatan kesadaran terhadap hak dan kewajiban politik, pemahaman tentang struktur pemerintahan, proses pengambilan keputusan, serta kemampuan untuk menginterpretasikan dan menilai informasi politik. Penguatan literasi politik bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mengambil peran yang lebih aktif dan efektif dalam kehidupan politik, termasuk dalam proses pemilihan umum, advokasi isu-isu publik, dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Upaya ini dapat melibatkan pendidikan formal dan informal, pelatihan, kampanye informasi, dan penggunaan media massa untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan politik masyarakat.

Pentingnya literasi politik juga selaras dengan hasil temuan penelitian oleh oleh (Akhyar Anshori et al., 2023) yang dimana, literasi politik memiliki kontribusi positif terhadap penanganan informasi hoax bagi pemilih pemula menghadapi Pemilu 2024. Selain itu, persepsi responden terhadap Pemilu 2024 juga memberikan kontribusi positif terhadap penanganan informasi hoax.



Gambar 1. Pemberian Penguatan Literasi Politik Menjelang Pemilu 2024

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, Penguatan literasi politik memiliki peran yang sangat penting bagi pemilih-pemula mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (NU) Gorontalo atau mahasiswa pada umumnya. Berikut beberapa alasan mengapa penguatan literasi politik sangat relevan dan penting:

1. **Pemahaman Sistem Politik Lokal dan Nasional:**  
Penguatan literasi politik membantu mahasiswa untuk memahami lebih dalam tentang sistem politik di tingkat lokal (Gorontalo) maupun nasional. Ini mencakup pemahaman terhadap struktur pemerintahan, peran lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta dinamika politik yang terjadi.
2. **Pengetahuan Mengenai Organisasi Keagamaan dan Politik:**  
Sebagai mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, pemahaman terhadap hubungan antara organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama, dengan dinamika politik sangatlah penting. Literasi politik dapat membantu mahasiswa memahami bagaimana organisasi keagamaan berperan dalam pengambilan kebijakan dan pemilihan umum.
3. **Pemahaman Program Politik dan Visi-Misi Kandidat:**  
Mahasiswa perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis dan memahami program politik serta visi-misi kandidat dalam pemilihan umum. Penguatan literasi politik dapat membantu mahasiswa mengevaluasi berbagai calon pemimpin dan memilih berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam.
4. **Partisipasi Aktif dalam Proses Demokrasi:**  
Literasi politik mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang baik tentang politik cenderung lebih terlibat dalam kegiatan pemilihan umum, memberikan suara, dan bahkan terlibat langsung dalam kegiatan politik.
5. **Menghindari Politik Identitas dan Hoaks:**  
Literasi politik membantu mahasiswa untuk memahami risiko politik identitas dan hoaks dalam suatu kampanye politik. Mereka dapat mengembangkan pemahaman kritis terhadap informasi yang mereka terima, sehingga dapat membuat keputusan politik yang lebih cerdas dan berdasarkan fakta.
6. **Mendorong Pemikiran Kritis dan Analitis:**  
Penguatan literasi politik dapat mengembangkan kemampuan pemikiran kritis dan analitis mahasiswa. Mereka menjadi lebih terampil dalam menilai argumen politik, memahami implikasi kebijakan, dan mengenali manipulasi informasi politik.
7. **Membentuk Warga Negara yang Bertanggung Jawab:**  
Mahasiswa yang memiliki literasi politik yang baik cenderung menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab. Mereka dapat memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta aktif berkontribusi dalam pembentukan kebijakan dan pembangunan masyarakat.

Dengan memahami pentingnya literasi politik, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo dapat menjadi agen perubahan yang cerdas dan berkontribusi positif dalam pembangunan negara dan masyarakat secara umum

#### **Penguatan Pengawasan Partisipatif Menjelang Pemilu 2024**

Penguatan pengawasan partisipatif mengacu pada usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol proses politik dan pemilihan umum. Ini melibatkan keterlibatan aktif warga dalam pemantauan jalannya pemilihan, pengungkapan informasi politik, serta penindakan terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap prinsip demokrasi. Penguatan ini mempromosikan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas proses politik dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam sistem politik. Primadi dan rekan-rekannya (2019) menyatakan bahwa kualitas dan integritas yang kuat dalam pemilihan umum bisa tercapai dengan melaksanakan pemilu secara terbuka, adil, dan jujur. Hal ini dapat diwujudkan dengan mendukung jalannya pemilu melalui pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat, serta melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil dalam memantau proses tersebut. Tujuan dari keterlibatan ini adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan mengurangi risiko tindakan kecurangan sejak tahap awal pemilihan. (Djaafar et al., 2023).

Adapun bentuk edukasi Penguatan Pengawasan Partisipatif Menjelang Pemilu 2024 bagi pemilih pemula mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

1. Merekomendasikan pemilih pemula (Mahasiswa) untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.

Pengertian dari rekomendasi untuk merekomendasikan pemilih pemula, khususnya mahasiswa, untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 adalah memberikan saran atau ajakan agar mereka secara aktif terlibat dalam proses pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Rekomendasi ini bersifat mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam kegiatan demokratis, seperti memberikan suara, mengikuti kegiatan kampanye, dan memahami peran penting mereka dalam membentuk arah kebijakan melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran politik, partisipasi aktif, dan kontribusi mahasiswa dalam pembangunan masyarakat dan negara melalui mekanisme demokratis.

2. Merekomendasikan pemilih pemula (Mahasiswa) untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan komisi pemilihan umum (KPU).

Pengertian dari rekomendasi untuk merekomendasikan pemilih pemula, terutama mahasiswa, untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah memberikan saran atau dorongan agar mereka aktif dalam mengidentifikasi, merekam, dan melaporkan setiap tindakan pelanggaran atau ketidakberesan yang terjadi selama proses pemilihan umum. Rekomendasi ini menggarisbawahi pentingnya peran pemilih pemula dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu, serta meningkatkan partisipasi dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran diatasi dan ditindaklanjuti oleh otoritas pemilu. Melalui partisipasi dalam pelaporan ke Bawaslu dan KPU, mahasiswa diharapkan dapat menjadi penjaga demokrasi yang proaktif dan berkontribusi dalam menjaga keadilan serta kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum.



Gambar 2. Penguatan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Pengawasan

Penguatan edukasi mengenai Pengawasan Partisipatif menjelang Pemilu 2024 bagi pemilih pemula, terutama mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, memegang peran krusial dalam membangun partisipasi demokratis yang berkualitas. Merekomendasikan mahasiswa untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum bertujuan merangsang kesadaran politik dan kontribusi aktif mereka dalam proses demokrasi. Dengan memahami betul peran mereka sebagai pemilih, mahasiswa dapat memberikan suara mereka berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang visi-misi kandidat dan program politik, sehingga mampu membentuk kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, rekomendasi untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran pemilu kepada Bawaslu dan KPU menekankan pentingnya partisipasi mahasiswa dalam menjaga integritas pemilu. Melalui pelaporan, mahasiswa dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan mengungkap pelanggaran, membantu menciptakan lingkungan pemilu yang bersih, transparan, dan bebas dari kecurangan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk membentuk generasi pemilih pemula yang cerdas, bertanggung jawab, dan aktif berkontribusi dalam memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

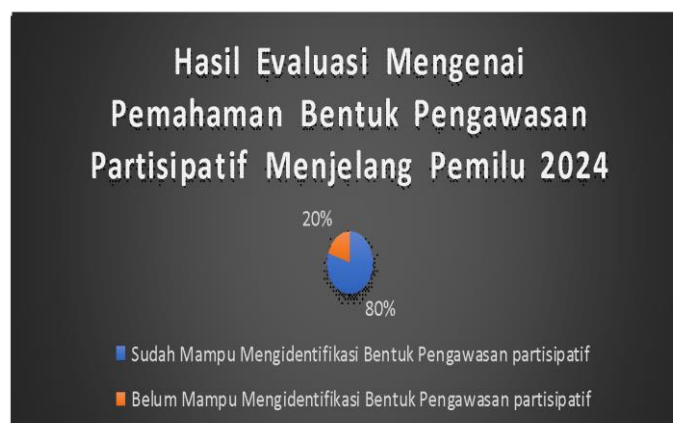
Secara keseluruhan Penguatan Demokrasi Dan Pemilu Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024 (Studi Pada Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo) menunjukkan untuk indikator Penguatan Literasi Politik Menjelang Pemilu 2024 menunjukkan perubahan pemahaman yang dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 3. Hasil Evaluasi Pemahaman Indikator Literasi Politik

Pada diagram lingkaran di atas, evaluasi pemahaman mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo dalam memilih sumber informasi menjelang Pemilu 2024 mengungkapkan gambaran yang signifikan. Dari total peserta sebanyak 25 orang, terlihat bahwa sebanyak 60% dari mereka mampu memilih sumber informasi yang kredibel sebagai bahan literasi politik. Ini mencerminkan tingkat pemahaman yang positif dalam memilih dan memilih informasi yang dapat memberikan pemahaman yang baik terkait dengan konteks politik dan pemilu. Di sisi lain, sebanyak 40% peserta masih menghadapi kesulitan dalam memilih sumber informasi, mengindikasikan perlunya peningkatan literasi politik di kalangan mahasiswa. Simpulan dari hasil evaluasi ini menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait pemilihan sumber informasi yang kredibel dan dapat dipercaya. Langkah-langkah penguatan literasi politik, seperti workshop pemahaman media, pelatihan pengenalan berita palsu, dan pembekalan keterampilan analisis informasi, dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyaring dan menggunakan informasi yang akurat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan persentase mahasiswa yang mampu memilih sumber informasi dengan lebih kritis, yang pada gilirannya akan mendukung partisipasi demokratis yang lebih efektif dan informasi yang lebih berkualitas dalam menyambut Pemilu 2024.

Selanjutnya, untuk hasil indikator Penguatan Pengawasan Partisipatif Menjelang Pemilu 2024 hasil evaluasi menunjukkan;



Gambar 4. Hasil Evaluasi Pemahaman Bentuk Pengawasan Partisipatif

Dari hasil evaluasi mengenai pemahaman bentuk pengawasan partisipatif menjelang Pemilu 2024, terlihat bahwa setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian mahasiswa, sebanyak 20% dari peserta belum mampu mengidentifikasi bentuk pengawasan partisipatif secara menyeluruh. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam memahami konsep dan mekanisme pengawasan partisipatif di kalangan sebagian peserta. Sementara itu, sebanyak 80% peserta yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini telah mampu mengidentifikasi bentuk pengawasan partisipatif menjelang Pemilu 2024. Angka ini mencerminkan keberhasilan kegiatan pengabdian mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman sebagian besar peserta terkait peran dan metode pengawasan partisipatif. Adanya peningkatan signifikan dalam kemampuan mengidentifikasi bentuk pengawasan partisipatif menunjukkan

efektivitas dari upaya pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini memberikan gambaran positif terkait dampak kegiatan pengabdian mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk pengawasan partisipatif menjelang Pemilu 2024. Namun, masih perlu dilakukan upaya lanjutan untuk mencakup peserta yang belum mampu mengidentifikasi bentuk pengawasan partisipatif. Dengan demikian, kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam menjalankan peran pengawasan partisipatif dapat lebih merata, memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga transparansi dan integritas Pemilu 2024.

## SIMPULAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan dua aspek penting. Pertama, dari segi pemahaman mahasiswa terkait pemilihan umum, sebanyak 60% peserta mampu memilih sumber informasi yang kredibel, sementara 40% masih memerlukan peningkatan literasi politik. Kedua, terkait pemahaman bentuk pengawasan partisipatif menjelang Pemilu 2024, sebanyak 20% peserta masih belum mampu mengidentifikasi secara menyeluruh, sedangkan 80% yang terlibat dalam kegiatan ini telah meningkatkan pemahamannya. Secara umum, hasil ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengabdian mahasiswa telah memberikan dampak positif terhadap pemahaman mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Meskipun masih terdapat sebagian peserta yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam meningkatkan literasi politik dan pemahaman mengenai pengawasan partisipatif, namun partisipasi mahasiswa dalam kegiatan tersebut secara signifikan telah memperbaiki pemahaman sebagian besar peserta. Oleh karena itu, untuk meningkatkan dampak positif dan meratakan pemahaman, disarankan untuk melanjutkan kegiatan pengabdian serupa dengan penekanan pada aspek-aspek yang memerlukan perhatian lebih, seperti pengembangan program literasi politik dan pelatihan lebih lanjut mengenai pengawasan partisipatif. Upaya ini dapat memastikan bahwa mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam mendukung proses demokrasi dan pemilihan umum di masa depan.

## SARAN

Melalui implementasi kegiatan pengabdian ini, disarankan agar Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo menginisiasi kegiatan edukatif yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang demokrasi dan pemilu. Untuk mencapai tujuan ini, direkomendasikan adanya kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), guna memberikan penguatan dan informasi terkini terkait Pemilu 2024. Selain itu, diharapkan partisipasi aktif mahasiswa dalam eksplorasi kegiatan yang merangsang diskusi dan peningkatan pengetahuan tentang pemilu, baik melalui organisasi di dalam maupun di luar kampus. Dengan demikian, diharapkan bahwa mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo dapat berperan sebagai agen perubahan dan penjaga demokrasi, khususnya dalam mengawal pelaksanaan pemilu tahun 2024. Rekomendasi ini dapat diintegrasikan dalam kerangka program pembinaan mahasiswa untuk menciptakan partisipasi aktif dan pemahaman yang mendalam mengenai peran mereka dalam proses demokrasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan tulus dan penuh rasa syukur, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias dalam kegiatan ini. Kepada mahasiswa semester 1 Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, mahasiswa di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, dan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, terima kasih atas dedikasi dan semangat kalian dalam mengikuti kegiatan ini. Tak lupa, kami juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada pihak Universitas Bina Taruna Gorontalo yang telah memberikan dukungan tanpa henti. Keterlibatan dan kontribusi kalian telah menjadi pilar utama keberhasilan kegiatan ini. Semua usaha dan kerja keras kalian sangat berarti bagi kami. Semoga kolaborasi dan semangat positif ini terus berlanjut, membawa manfaat dan pengalaman berharga bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar Anshori, Rudianto, & Jehan Ridho Izharsyah. (2023). Dampak Literasi Politik Dan Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula Terhadap Pengendalian Informasi Hoax. *Jurnal Audiens*, 4(1), 86–97. <https://doi.org/10.18196/Jas.V4i1.8>
- Alhadar, S., Mahmud, R., Gobel, L. Van, Sahi, Y., & Mahadi, R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah ( Umkm ) Gula Semut Berbasis Digital Marketing. *Jurnal*



- Mandala Pengabdian Masyarakat, 3(2), 80–86.
- Djaafar, L., Mahmud, R., & ... (2023). Siswa Bertanya Pemilu Menjawab: Penguatan Pengawasan Partisipatif Bagi Siswa Di Sma Negeri 11 Gorontalo Utara. *Community Development Journal*, 4(4), 9166–9172.
- Kamuli, S., Latare, S., & Sahi, Y. (2024). Implikasi Konflik Partai Politik Terhadap Paradigma Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024: Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. *Jimps: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 3158–3170. <https://jim.usk.ac.id/sejarah>
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251–264. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Tapis*, 12(1), 38–53.
- Sahi, Y., Jama, S., Hulubangga, A., & Kaaba, A. (2023). Pergulatan Doktrin Politik Nahdlatul Ulama: (Refleksi Masa Kolonial Belanda, Jepang, Era Kemerdekaan, Orde Baru Hingga Pasca Reformasi Di Indonesia). *Jp: Jurnal Polahi*, 1(1), 1–16.
- Shobahah, N. (2019). Piagam Madinah Dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik. *Ahkam*, 7(1), 195–2014.